

**EVALUASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA BLUD
PUSKESMAS DI BPKAD SIDOARJO**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Diploma 3
Program Studi Akuntansi



Oleh :

DEDE EGY PRAYOGI

2015410936

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2018

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Dede Egy Prayogi
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 21 November 1995
N.I.M : 2015410936
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma 3
J u d u l : Evaluasi Laporan Realisasi Anggaran Pada BLUD Puskesmas
di BPKAD Sidoarjo

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,

Tanggal: 25 - 9 - 18


(Putri Wulanditva, SE., M.Ak., CPSAK)

Ketua Program Studi Diploma 3

Tanggal: 26 - 9 - 18


(Drs. Ec. Mochammad Farid, M.M.)

**EVALUATION BUDGET REALIZATION REPORT
ON PUSKESMAS BLUD IN BPKAD SIDOARJO.**

**DEDE EGY PRAYOGI
2015410936**

Email : kamuifuuma0@gmail.com
STIE Perbanas Surabaya

**Putri Wulanditya
NIP : 36120144**

Email : putri@perbanas.ac.id
STIE Perbanas Surabaya
Wonorejo Timur No, 16 Surabaya

ABSTRACT

Accounting is a system of processing input and into output. Application of such accounting has been done by government agencies in the preparation of its financial statements. Especially the government agencies of Sidoarjo Regency, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Each reporting and evaluation of financial statements, BPKAD uses two types of reports, namely reports of system and manual reports. However, in reporting and evaluating there are some obstacles, namely the inequality of financial statements of agency units of the system results with the financial statements in the form of documents provided directly by relevant agencies. This is often the case with the reporting of the Budget Realization Report (LRA) from the agency unit of Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) of the Puskesmas located in Sidoarjo. Therefore if the reporting is not the same then the resulting LRA will also not be appropriate. Therefore, the researcher is interested to know the evaluation of LRA on BLUD Puskesmas in BPKAD Sidoarjo. The method used by the researcher is descriptive quantitative. From the results of research conducted by researchers found that the error that occurred during the evaluation of LRA BLUD Puskesmas is manual data experience error as the value shown is not the same as on the system. This is due to human error. We recommend that the BLUD Puskesmas manual report is given first to Dinas Kesehatan in order to avoid manual data inequality errors with existing data on the system when given to BPKAD Sidoarjo.

Keywords: BLUD, Evaluation, Budget Realization Report

PENDAHULUAN

Suatu organisasi dalam pengendalian ekonominya tentu dibutuhkan pencatatan dalam transaksi pengeluaran maupun pemasukan aset keuangannya. Proses pencatatan ini sangat penting bagi organisasi dalam menentukan suatu keputusan ekonomi di masa berikutnya. Proses yang dilakukan oleh organisasi ini biasa disebut dengan akuntansi.

Mahsun (2011 : 91) mendefinisikan akuntansi adalah suatu kegiatan jasa untuk menyediakan data dan informasi kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan, dari satuan usaha yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Sesuai dengan pengertian akuntansi sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahsun, salah satu dari beberapa informasi yang digunakan organisasi untuk mengambil

keputusan ekonomi itu adalah informasi keuangan yang disajikan oleh akuntansi. Selanjutnya Siregar (2015 : 2) menjelaskan bahwa organisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi sektor privat dan organisasi sektor publik. Perbedaan signifikan antara organisasi sektor privat dengan sektor publik terletak pada orientasi terhadap laba. Tujuan utama organisasi sektor privat adalah memaksimalkan laba. Sedangkan tujuan pokok organisasi sektor publik adalah layanan kepada masyarakat. Organisasi pokok yang termasuk kategori sektor publik yang mengelola dana masyarakat adalah pemerintahan, baik Pemerintahan Pusat maupun Pemerintah Daerah. Selain pemerintahan, berbagai organisasi lain juga dikategorikan sebagai organisasi sektor publik. Contoh organisasi lain yang termasuk bagian dari sektor publik adalah perguruan tinggi, rumah sakit, BUMN, BUMD, dan lembaga sosial masyarakat. Walaupun berbagai organisasi termasuk dalam kategori sektor publik, organisasi yang secara umum dikaitkan dengan sektor publik adalah pemerintahan. Karena itu tidak heran jika akuntansi sektor publik juga didominasi oleh akuntansi pemerintahan atau akuntansi keuangan daerah.

Mahsun (2011 : 91) mendefinisikan Akuntansi Keuangan Daerah adalah Serangkaian kegiatan pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, peringkasan, penyajian atau pelaporan data keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam kegiatan akuntansi keuangan daerah untuk menghasilkan suatu informasi ekonomi tentunya tidak hanya dilakukan suatu pencatatan saja melainkan dilakukannya perhitungan serta evaluasi agar hasil informasi ekonomi yang dihasilkan lebih efisien dan dapat dipertanggung jawabkan. Perbedaan utama antara Akuntansi

Keuangan Daerah dengan Akuntansi Perusahaan terletak pada fungsinya. Fungsinya Akuntansi Pemerintahan biasanya lebih ditekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran negara serta pelaporan realisasinya.

Untuk praktik keseharian, membuat akuntansi pemerintahan perlu memiliki keahlian akuntansi keuangan daerah agar laporan yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Tujuan diberlakukannya ini agar meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomer 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP. Dalam penerapan akuntansi keuangan daerah memiliki sistem siklus akuntansi.

Menurut Halim dan Kusufi (2014 : 4) akuntansi adalah suatu sistem mengolah input (masukan) dan menjadi output (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outputnya adalah laporan keuangan.

Siklus akuntansi merupakan sistematisasi pencatatan transaksi keuangan, peringkasan, dan pelaporan keuangan. Siklus akuntansi keuangan daerah dimulai dari analisis transaksi yang ada, pengesahan, pencatatan dalam buku jurnal, posting buku besar, penyesuaian akun, serta penyusunan laporan keuangan. Jenis transaksi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah mencakup transaksi penerimaan, transaksi belanja, dan transaksi pembiayaan.

Penerapan kegiatan akuntansi seperti ini telah dilakukan oleh pihak instansi pemerintah dalam pembuatan laporan keuangannya. Terutama instansi pemerintah yang dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo,

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). BPKAD adalah instansi pemerintah yang dimiliki yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan keuangan seluruh instansi-instansi yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Dalam mengelola keuangan BPKAD membuat laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Setiap pelaporan serta evaluasi laporan keuangannya BPKAD menggunakan dua jenis laporan, yaitu laporan dari sistem dan laporan manual berupa dokumen. Namun dalam pelaporan dan pengevaluasi terdapat beberapa kendala, yaitu ketidaksamaan laporan keuangan unit instansi dari hasil sistem dengan laporan keuangan yang berupa dokumen yang diberikan langsung oleh instansi terkait. Ketidaksamaan ini akan membuat laporan keuangannya tidak sesuai dengan data sebenarnya. Hal ini sering terjadi pada laporan realisasi dari unit instansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas yang berada di Sidoarjo. Laporan realisasi ini nantinya yang akan dibentuk suatu laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran yang direkap oleh BPKAD Sidoarjo. Karena itu apabila pelaporan ini tidak sama maka laporan realiasi anggaran yang dihasilkan juga tidak akan sesuai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Laporan Realisasi Anggaran Pada BLUD Puskesmas Di BPKAD Sidoarjo”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Murwanto (2014 : 11) akuntansi sektor publik adalah pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian menurut Siregar (2015 : 3) akuntansi sektor publik merupakan aktifitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor

publik. Akuntansi sektor publik dapat dinyatakan sebagai aktifitas akuntansi yang diterapkan pada pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *financial*, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik (Mardiasmo, 2009 : 61).

Anggaran merupakan rencana aktifitas bisnis perusahaan jangka pendek, biasanya 12 bulan yang meliputi pengkoordinasian secara rinci rencana operasi perusahaan yang diharapkan selama periode yang dianggarkan. Rencana operasi perusahaan meliputi rencana atau target penjualan, beban-beban, penerimaan dan pengeluaran kas, laba bersih, posisi kas, neraca, dan tujuan-tujuan lain yang ditentukan manajemen. Sementara dalam hal periode anggaran mungkin meliputi bulanan, kuartalan, atau tahunan. Anggaran ini kadang disebut juga sebagai laporan keuangan pro forma (Andriana, 2008 : 1).

Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:

- a. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*), anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

- b. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*), sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati, dan manager publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif.
- c. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*), anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- d. Anggaran Sebagai Alat Politik (*Political Tool*), anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi merupakan alat politik. Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill, coalition building*,

keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manager publik. Manager publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah.

Mekanisme Penyertaan Anggaran dan Pencairan Anggaran

Menurut Halim dan Kusufi (2014 : 4), akuntansi adalah suatu sistem. Suatu sistem mengolah input (masukan) dan menjadi output (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Output-nya adalah laporan keuangan.

Lebih lanjut dikatakan, dalam konteks akuntansi keuangan daerah terdapat sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah menurut peraturan yang lama (Kepmendagri No. 29 Tahun 2002) adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Dalam sistem akuntansi keuangan daerah, contoh input-nya adalah bukti memorial, Surat Tanda Setoran, atau Surat Perintah Pencairan Dana Lansung (SP2D-LS). Sementara contoh output-nya adalah laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (PP No. 71 Tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah, Paragraf 28).

Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan yang ada dalam sistem akuntansi. Berikut tahapan-tahapan tersebut.

1. Mendokumentasikan transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut.

2. Mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal. Tahapan ini disebut menjurnal.
3. Meringkas dalam buku besar, transaksi-transaksi keuangan yang sudah dijurnal. Tahapan ini disebut memposting atau mengakunkan.
4. Menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan memindahkannya ke dalam neraca saldo.
5. Melakukan penyesuaian buku besar berdasarkan informasi yang paling terbaru (*up to date*).
6. Menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan memindahkannya ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan.
7. Menyusun laporan keuangan berdasarkan neraca saldo setelah disesuaikan.
8. Menutup buku besar.
9. Menentukan saldo-saldo buku besar dan memindahkannya ke dalam neraca saldo setelah tutup buku.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran diatur dalam standar akuntansi pemerintah No. 2. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Manfaatnya adalah untuk menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus, dan defisit, serta pembiayaan yang dibandingkan dengan anggaran.

Laporan realisasi anggaran tersebut berguna bagi pemakai untuk mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Laporan

realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos pendapatan, belanja, transfer, surplus, dan defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan bersih, dan sisa lebih-kurang pembiayaan anggaran (Andayani, 2006 : 138).

Pengertian Pendapatan

Pendapatan menurut PSAP No. 2 Paragraf 7 adalah semua penerimaan rekeneing kas umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah (Rambe, 2016 : 110).

Pendapatan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pendapatan didefinisikan sebagai hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran (Zamzami, 2014 : 137).

Pendapatan diakui pada saat diterimanya kas oleh bendahara penerimaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPKD) atau Bendahara Umum Daerah di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) (Taufiq, 2012 : 31).

Klasifikasi Pendapatan

Pendapatan daerah menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan. Pendapatan daerah yang dimaksud dikelompokkan atas:

a. Pendapatan Asli Daerah

Kelompok pendapatan asli daerah menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai

dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retibusi daerah.

- b. Pendapatan Perimbangan
Kelompok pendapatan dana perimbangan dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - 1. Dana bagi hasil pajak.
 - 2. Dana alokasi umum.
 - 3. Dana alokasi khusus.
- c. Pendapatan Transfer
PSAP No. 3 Paragraf 8 menyebut bahwa pendapatan transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kelompok lain-lain pendpatan daerah yang sah dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:
 - 1. Hibah berasal dari pemerintah.
 - 2. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan akibat bencana alam.
 - 3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten atau kota.
 - 4. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - 5. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Pengertian Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sementara menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, belanja

daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas (Rambe, 2016 : 153). Sedangkan menurut Sudaryo (2017 : 129) belanja diartikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset langsung yang memberi manfaat lebih dari satu periode.

Klasifikasi Belanja

Klasifikasi belanja untuk tujuan pelaporan keuangan menurut PSAP No. 2 Paragraf 36-40 dikelompokkan menjadi:

- a. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat atau daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.
- b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud.
- c. Belanja Lain-Lain, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat atau daerah.
- d. Transfer Keluar, merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan

oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Namun, berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011, belanja dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dikelompokkan menurut jenis belanja yang terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

d. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan

yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

e. Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/ kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan.

h. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

- b. Belanja Barang dan Jasa
Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- c. Belanja Modal
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

Sejarah Berdirinya Perusahaan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomer 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati.

BPKAD ini berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 88 Tahun 2016 merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BPKAD Sidoarjo sebelumnya adalah instansi yang bernama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau disingkat dengan DPPKA sebelum tahun 2016 dirubah menjadi BPKAD. Setiap tahunnya BPKAD melakukan pengelolaan dari pembuatan anggaran hingga pelaporan realisasi

anggaran untuk seluruh instansi yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Visi BPKAD Kabupaten Sidoarjo

Visi BPKAD Kabupaten Sidoarjo tidak dapat lepas dari ruang lingkup “Visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo”, karena BPKAD Kabupaten Sidoarjo merupakan Perangkat Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset juga merupakan elemen penting di dalam suksesnya pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut. Visi BPKAD Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan adalah “Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan”.

Misi BPKAD Kabupaten Sidoarjo

Misi BPKAD Kabupaten Sidoarjo adalah "Meningkatkannya sistem akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan”.

Profil Usaha

Berdasarkan <http://ppid.bpkad.jatimprov.go.id>, BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, penatausahaan APBD, akuntansi keuangan dan aset daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota, dan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam setiap daerah terdapat satu lembaga BPKAD, terutama di daerah Kabupaten Sidoarjo. BPKAD selaku pengelola keuangan melakukan fungsinya dalam mengelolah keuangan untuk beberapa instansi di Sidoarjo termasuk Dinas Kesehatan. Dalam hal ini Dinas Kesehatan yang dikelola keuangannya termasuk bagian unit terkecil diantaranya satu rumah sakit dan dua puluh enam unit puskesmas yang ada di Sidoarjo.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Anggaran

Anggaran dalam suatu instansi dikenal dengan sebutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD. Anggaran ini memiliki peran pendanaan untuk instansi-instansi yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Dana anggaran ini nantinya akan membiayai setiap program yang diadakan oleh para pengguna anggaran atau instansi di Sidoarjo. Dalam hal ini anggaran disusun oleh BPKAD Sidoarjo selaku instansi pengelola keuangan dan dikerjakan di bidang anggaran. Untuk penyusunan anggarannya dibuat berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD atau disingkat RKA-SKPD. RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah diajukan oleh instansi dan telah disepakati oleh pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar penyusunan anggaran.

Proses pembuatan anggaran sendiri bagi semua instansi semuanya sama. Begitu juga untuk anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas, Dinas Kesehatan mendata segala perencanaan dan penganggaran rencana kerja semua BLUD Puskesmas yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya akan dibentuk RKA-SKPD Dinas Kesehatan. RKA-SKPD ini yang akan disetor kepada BPKAD untuk disusun RKA-SKPD yang resmi dan dibahas dalam suatu rapat dengan DPRD. Setelah dilakukan pembahasan dengan DPRD, hasil pembahasan inilah akan dibentuk suatu keputusan yang ditetapkan dalam bentuk dokumen yang menghasilkan anggaran yang akan siap dicairkan atau yang disebut DPA-SKPD.

Mekanisme Penyusunan Anggaran

Dalam penyusunan, BPKAD di bidang anggaran memiliki tahapan-tahapan dalam pembuatan anggaran yaitu:

1. Penyusunan RKP

2. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah
3. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD kemudian dilakukannya pembahasan dengan DPRD
4. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS.
5. Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD
6. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA PPKD serta penyusunan RaPerda tentang APBD
7. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD kemudian dilakukannya pembahasan dengan DPRD
8. Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah
9. Menyampaikan Raperda tentang APBD dan Raperbub tentang penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi
10. Hasil evaluasi Raperda tentang APBD dan Raperbub tentang penjabaran APBD
11. Penyempurnaan Raperda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Raperda tentang APBD
12. Penyampaian Keputusan DPRD tentang penyempurnaan Raperda tentang APBD kepada Gubernur
13. Penetapan Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD sesuai hasil evaluasi
14. Penyampaian Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur

Pencairan Dana Anggaran

Setelah DPA Dinkes terbentuk, maka DPA tersebut telah siap digunakan. DPA

akan dikirim oleh BPKAD ke pusat melalui aplikasi, kemudian pusat akan mengirimkan dana melalui rekening Dinkes dan ke seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Sidoarjo sesuai anggaran yang telah ditetapkan.

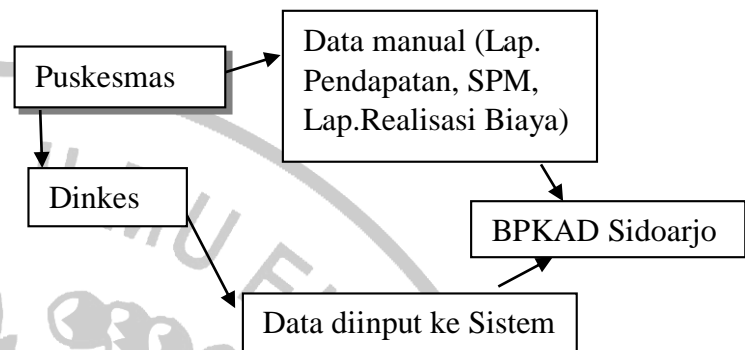
Dalam proses pencairan dana BPKAD tidak memiliki peran dalam pengiriman atau pendataan dana yang telah sampai ke rekening BLUD Puskesmas. pendataan dana yang telah sampai rekening akan dikelola sendiri oleh masing-masing BLUD Puskesmas dan Dinkes.

Laporan Realisasi Anggaran

Setelah semua instansi menggunakan dan mengelola dana anggaran yang telah dicairkan untuk menjalankan aktifitasnya, instansi akan memberikan laporan pengeluaran dan pemasukan dari hasil anggaran yang digunakan, laporan ini disebut dengan laporan realisasi anggaran atau disingkat LRA. Laporan realisasi anggaran untuk semua instansi akan dikirim atau dilaporkan setiap satu bulan sekali pada akhir bulan kepada BPKAD selaku pengelola keuangan pada bidang akuntansi, begitu juga dengan salah satu unit dinas kesehatan yaitu Puskesmas. Untuk setiap realisasi anggaran BLUD Puskesmas memiliki dua jenis pelaporan berupa data manual dan data yang sudah berada di sistem. Data manual dikirim ke BPKAD dalam bentuk dokumen-dokumen yang terdiri dari laporan pendapatan, laporan realisasi biaya, dan surat perintah membayar. Sedangkan untuk data yang disistem berupa excel yang telah disusun dan diinput oleh Dinas Kesehatan kemudian dikirim kepada BPKAD melalui sistem tersebut.

Berikut mekanisme pelaporan LRA BLUD

Puskesmas Sidoarjo:



Sumber: diolah

Gambar 4.2

MEKANISME PELAPORAN LRA BLUD PUSKESMAS

Data realisasi anggaran BLUD Puskesmas yang di sistem merupakan data yang input oleh Dinkes dari perhitungan yang dilakukan oleh Dinkes berdasarkan bukti dokumen transaksi yang diberikan dari BLUD Puskesmas sendiri. Dalam pencatatan laporan keuangan BLUD Puskesmas, baik Dinkes maupun BLUD Puskesmas sama-sama melakukan perhitungan. Dinkes selaku instansi yang menaungi BLUD Puskesmas berhak ikut menghitung pendapatan dan belanja BLUD Puskesmas untuk disusun dalam laporan realisasi anggaran. Sedangkan BLUD Puskesmas selaku Badan Layanan juga ikut ambil adil dalam melakukan perhitungan laporan keuangannya sendiri termasuk pendapatan dan belanja. Karena laporan realisasi anggaran BLUD memiliki dua bentuk, disitulah peran BPKAD selaku penerima laporan realisasi anggaran dalam bentuk laporan manual dan berupa data di sistem melakukan evaluasi.

Evaluasi Laporan Realisasi Anggaran

Setelah BPKAD memperoleh data manual berupa dokumen-dokumen yang diberikan langsung oleh BLUD pukesmas dan data yang ada pada sistem dari dinkes,

maka BPKAD di bidang akuntansi melakukan evaluasi pada realisasi anggaran BLUD pukesmas bagian pendapatan dan belanja dengan cara melakukan pencocokan data manual yang diberikan langsung dari puskesmas dengan data yang ada pada sistem. Hal ini dilakukan agar data manual yang diberikan dengan data yang ada pada sistem telah sesuai dengan benar adanya sebelum dikirim dan dilaporkan kepada pihak pusat, yaitu Bupati Sidoarjo. Namun sering kali saat melakukan evaluasi di bidang akuntansi terdapat atau terjadi kesalahan berupa ketidaksesuaian data manual dengan data pada sistem, baik itu pada pendapatan maupun belanja.

Evaluasi Pendapatan

Pendapatan merupakan aliran masuk dalam laporan realisasi anggaran BLUD Puskesmas. Pendapatan juga dievaluasi oleh bidang akuntansi BPKAD untuk dilihat apakah data telah benar dan sesuai dengan sistem. Pendapatan ini terdiri dari pendapatan dana retribusi, pendapatan dana kapitasi, pendapatan dana non kapitasi dan pendapatan bunga. Untuk kegiatan evaluasi di bidang akuntansi hal yang diperhatikan dalam pendapatan adalah total pendapatan serta perincian pendapatan. Berikut ini adalah evaluasi realisasi anggaran untuk pendapatan:

Tabel 4.2
DATA REKAP PENDAPATAN BLUD
PUSKESMAS SELAMA
BULAN NOVEMBER 2017

No.		Retribusi Pelkes	Bpjs Kapitasi	Bpjs Non Kapitasi	Bunga	Total
1	FTKP Tarik	21.400.000	251.815.300	26.440.000	2.170.878,81	301.826.178,81
2	FTKP Prambon	45.928.500	201.507.100	168.940.000	3.790.045,51	420.165.645,51
3	FTKP Krembung	21.531.500	227.647.300	1.950.000	1.861.702,47	252.990.502,47
4	FTKP Porong	144.749.000	123.058.000	65.230.000	1.022.179,62	334.059.179,62
5	Dst	-	-	-	-	-

Sumber : Bidang Akuntansi, diolah

Dari gambar Tabel 4.1 merupakan rekap pendapatan yang telah sesuai dengan nilai yang ada di sistem. Berdasarkan rekap total pendapatan yang dimiliki Puskesmas

setiap kecamatan pada tabel di atas jika mengambil salah satu contoh yaitu puskesmas tarik yang memiliki total pendapatan sebesar Rp. 301.826.178,81 , kemudian kita cocokkan dengan data manual berupa dokumen dengan melihat Gambar 4.3 yaitu laporan pendapatan pada kolom lima atau kolom realisasi bulan ini memiliki nilai total yang sama, yaitu Rp. 301.826.178,81. Jika nilai tersebut sama maka data realisasi pendapatan untuk BLUD Puskesmas Kecamatan Tarik dianggap sesuai atau benar.

Evaluasi Belanja

Belanja merupakan pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran selama periode berjalan pada laporan realisasi anggaran. Tidak hanya pendapatan yang dievaluasi, belanja juga bagian yang harus dievaluasi oleh bidang akuntansi BPKAD Sidoarjo. Belanja pada BLUD puskesmas terdiri dari biaya-biaya yang telah direalisasi atau yang telah dibayarkan oleh BLUD puskesmas. Belanja yang terealisasi ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal. Untuk kegiatan evaluasi belanja yang dilakukan bidang akuntansi, hal yang diperhatikan sama seperti evaluasi pendapatan yaitu total belanja dan perincian belanja. Berikut ini evaluasi realisasi anggaran untuk belanja:

Tabel 4.3
DATA REKAP BELANJA BLUD
PUSKESMAS SELAMA
BULAN NOVEMBER 2017

No.		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	Total
1	FTKP Tarik	1.000.000	244.486.121	9.500.000	254.986.121
2	FTKP Prambon	500.000	370.858.550	85.602.500	456.961.050
3	FTKP Krembung	1.100.000	505.146.719	67.375.000	573.621.719
4	FTKP Porong	2.500.000	576.298.225	93.100.000	671.898.225
5	Dst	-	-	-	-

Sumber : Bidang Akuntansi, diolah

Dari gambar tabel 4.2 merupakan data rekap belanja yang telah sesuai dengan sistem. Berdasarkan rekap total belanja yang dimiliki puskesmas setiap kecamatan pada Tabel 4.2 sebelumnya dan mengambil salah satu contoh yaitu puskesmas tarik yang memiliki total belanja pada bulan november 2017 sebesar Rp. 254.986.121, kemudian dicocokkan dengan data manual berupa dokumen dengan melihat Gambar 4.5 yaitu laporan realisasi biaya pada kolom lima atau kolom realisasi bulan ini memiliki nilai total yang sama, yaitu Rp. 254.986.121. Jika nilai tersebut sama maka data realisasi belanja untuk BLUD puskesmas kecamatan Tarik dianggap sesuai atau benar. Namun sebelumnya pada laporan ini terdapat kesalahan yang membuat laporan ini sebelumnya tidak sesuai.

Evaluasi Laporan di Sistem

Laporan yang disistem merupakan data laporan realisasi anggaran yang diinput oleh Dinkes dan diberikan kepada BPKAD melalui sistem dalam bentuk aplikasi yang dibuat sendiri untuk seluruh Dinas Sidoarjo yang bernama Sikda. Laporan ini merupakan Laporan Realisasi Anggaran Dinkes yang didalamnya terdapat realisasi anggaran BLUD Puskesmas.

Dalam hal ini data yang berada di sistem belum pernah mengalami kejadian kesalahan data seperti laporan manual BLUD Puskesmas yang diberikan langsung kepada BPKAD akibat *human error*. *Human error* yang terjadi pada BLUD Puskesmas sering terjadi karena beberapa pegawai BLUD Puskesmas terkadang melakukan kesalahan dalam menginput nilai transaksi pada laporan sehingga sering terjadi kesalahan yang membuat nilai laporan manual yang dilaporkan BLUD Puskesmas dengan yang data yang diinput oleh Dinkes pada sistem tidak sama. Karena itu laporan manual BLUD Puskesmas yang telah diperbaiki dan telah sesuai serta dikirim kembali kepada BPKAD telah sesuai dengan nominal yang

ada di sistem tanpa ada perubahan data nominal yang pada sistem.

Prosedur perbaikan yang digunakan BPKAD dalam menangani permasalahan yang terjadi pada laporan BLUD Puskesmas dengan cara memanggil pihak BLUD Puskesmas yang mengalami permasalahan pada laporan realisasi anggarannya dan pihak Dinas Kesehatan agar memberikan klarifikasi atas kesalahan yang terjadi. Serta memberikan waktu untuk melakukan perbaikan dan pengiriman ulang laporan realisasi anggaran.

Standar Prosedur Perbaikan

Standar prosedur dalam mengatasi kesalahan data pada laporan manual laporan realisasi anggaran BLUD Puskesmas sebagai berikut:

1. Staff Akuntansi di Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi di BPKAD Sidoarjo selaku pengevaluasi laporan realisasi anggaran melakukan pemanggilan kepada pihak BLUD Puskesmas yang mengalami permasalahan dalam laporannya dan pihak Dinas Kesehatan.
2. Meminta klarifikasi terhadap pihak BLUD Puskesmas dan Dinas Kesehatan setelah dilakukannya pemanggilan.
3. Memberikan waktu perbaikan atau waktu pengiriman ulang laporan kepada BLUD Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk dikirim kembali kepada Staff Akuntansi BPKAD Sidoarjo.

Solusi atas Evaluasi Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan dari hasil peneliti melakukan evaluasi terhadap laporan realisasi anggaran BLUD Puskesmas yang sering mengalami kesalahan pada laporan manual, maka peneliti memberikan saran agar tidak terjadi kembali kesalahan-kesalahan seperti ini. Berikut adalah saran yang diberikan dari peneliti:

1. Sebaiknya laporan manual BLUD Puskesmas diberikan terlebih dahulu kepada pihak Dinkes agar dievaluasi atau dicocokkan terlebih dahulu dengan perhitungan yang dilakukan oleh Dinkes dalam pembuatan laporan yang ada sistem, agar tidak terjadi kesalahan ketidaksamaan data manual dengan data yang data yang di sistem saat diberikan kepada BPKAD.
2. Sebaiknya setelah Dinkes melakukan evaluasi terhadap laporan realisasi anggaran BLUD Puskesmas, Dinkes memberikan data di sistem sekaligus memberikan laporan manual kepada BPKAD agar laporan tersebut dianggap benar dan layak sebagai laporan keuangan pemerintahan.

PENUTUP

Kesimpulan

BPKAD Sidoarjo merupakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Sidoarjo. BPKAD merupakan instansi yang mengelola keuangan seluruh instansi yang ada di Sidoarjo, dari pembuatan anggaran hingga proses pelaporan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) . Anggaran adalah dana yang akan digunakan oleh instansi dalam menjalankan program kerja, sedangkan pelaporan LRA adalah pelaporan laporan dana keuangan yang telah keluar dan masuk setelah penggunaan dana anggaran. Setiap pelaporan LRA milik seluruh instansi akan dilaporkan kepada BPKAD untuk dilakukan suatu evaluasi. Namun dalam proses kegiatan tersebut sering kali terdapat suatu kendala atau kesalahan yang terjadi yang membuat kinerja dari BPKAD sendiri mengalami hambatan, seperti halnya saat kegiatan mengevaluasi LRA pada salah satu unit Dinas Kesehatan yaitu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas. Kegiatan evaluasi ini dilakukan oleh Bidang Akuntansi di BPKAD Sidoarjo. Dilakukan suatu evaluasi dikarenakan pelaporan LRA

BLUD Puskesmas memiliki dua jenis data yaitu data manual berupa dokumen yang dikirim langsung kepada BPKAD dan data yang di sistem aplikasi yang buat khusus untuk pemerintahan sidoarjo yang bernama Sikda yang diinput oleh instansi Dinas Kesehatan. BPKAD selaku penerima dua jenis data LRA BLUD Puskesmas melakukan evaluasi dengan cara mencocokkan data manual dengan data yang ada di sistem. Kesalahan yang terjadi pada saat evaluasi ini adalah data manual yang berikan langsung oleh BLUD Puskesmas kepada BPKAD memiliki nilai yang berbeda dengan data yang di sistem yang diinput sendiri oleh pihak Dinas Kesehatan. Dalam menangani kesalahan yang terjadi pada LRA BLUD Puskesmas, BPKAD di Bidang Akuntansi melakukan pemanggilan kedua pihak yaitu pihak Dinas Kesehatan dan pihak terkait pemilik laporan yaitu BLUD Puskesmas untuk mengklarifikasi dan melakukan perbaikan laporan sehingga laporan dapat diperbaiki dan dikirim kembali kepada BPKAD dengan data yang sudah benar dan layak untuk dilaporkan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa kesalahan yang terjadi pada saat evaluasi LRA BLUD Puskesmas adalah data manual yaitu berupa laporan yang diberikan langsung kepada BPKAD mengalami kesalahan seperti nilai yang ditunjukkan tidak sama dengan yang ada pada sistem. Hal ini dikarenakan akibat *human error*, kesalahan ini terjadi dikarenakan beberapa pegawai BLUD Puskesmas sering kali lupa memasukan nilai dari beberapa transaksi yang dilakukan. Akibat dari permasalahan *human error* yang dilakukan BLUD Puskesmas adalah kesalahan data pada nilai laporan realisasi anggaran BLUD Puskesmas yang diberikan langsung kepada BPKAD tidak sama atau tidak sesuai dengan data yang diinput di sistem oleh pihak Dinas Kesehatan dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Dinas

Kesehatan sendiri. Sedangkan dari sisi sistem tidak terjadi kesalahan data, karena setiap kali setelah LRA ini diperbaiki, data yang pada sistem tidak mengalami perubahan melainkan data manual yaitu laporan yang diberikan langsung dari BLUD Puskesmas yang menyesuaikan dengan data yang ada di sistem.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah diperoleh, peneliti memberikan saran perbaikan dan pertimbangan bagi instansi diantaranya:

1. Bagi BPKAD Sidoarjo
Sebaiknya laporan manual BLUD Puskesmas diberikan terlebih dahulu kepada pihak Dinkes agar dievaluasi atau dicocokkan terlebih dahulu dengan perhitungan yang dilakukan oleh Dinkes dalam pembuatan laporan yang ada di sistem, agar tidak terjadi kesalahan ketidaksamaan data manual dengan data yang ada pada sistem saat diberikan kepada BPKAD.
2. Bagi Dinkes Sidoarjo
Sebaiknya setelah Dinkes melakukan evaluasi pelaporan terhadap LRA BLUD Puskesmas, Dinkes memberikan data disistem sekaligus memberikan laporan manual kepada BPKAD agar laporan tersebut dianggap benar dan layak sebagai laporan keuangan pemerintahan.

Implikasi

Adapun implikasi yang dapat dilakukan oleh BPKAD Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan pekerjaan terkait evaluasi pelaporan LRA BLUD Puskesmas kepada pihak Dinkes agar tidak terjadi hambatan pada kinerja BPKAD
2. Dibuat suatu tanda pada sistem apabila terdapat data yang tidak sama saat dicocokkan agar dapat mengetahui data

tersebut benar atau belum sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi.

DAFTAR RUJUKAN

- Andayani, W. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: Bayumedia.
- Andriana. (2008). *Permodelan Anggaran dengan Microsoft Excel*. Jakarta: PT Gramedia.
- Arifin, J. (2007). *Aplikasi Excel untuk Akuntansi Manajemen*. Jakarta: PT Elex Media Koputindo.
- Erlina. (2016). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- KBBI. (2018, April 2). *KBBI DARING*. Retrieved April 4, 2018, from KBBI DARING: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Mahsun, M. (2011). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Murwanto, R. (2014). *Audit Sektor Publik*. Jakarta: LPKPAP.
- Rambe, O. S. (2016). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.

Sholichuddin. (2010). Menuju BLUD. *Warta RSUD* , 9.

Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*l. Yogyakarta: Sekoah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Sudaryo, Y. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: ANDI.

Taufiq, I. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: LKMPD.

Yadiati, W. (2006). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.

Zamzami, F. (2014). *Audit Keuangan Sektor Publik Untuk Laporan Keuangan Pemerintah*. Yogyakarta: GADJAMADA UNIVERSITY.